

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Oleh :

**YOHANES NDOA OWA
NPM : 201720251024**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penerapan Hukum Terhadap Anggota POLRI Yang Menggunakan Kekerasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : YOHANES NDOA OWA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720251024

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 29 Juni 2019

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN : 0319046403

Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, S.H., M.M.

NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penerapan Hukum Terhadap Anggota POLRI Yang Menggunakan Kekerasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : YOHANES NDOA OWA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720251024

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Juni 2019

Jakarta, 29 Juni 2019

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN : 0323035802

Penguji I : Dr. Yurnal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0314125804

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN : 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Awaludin Marwan, S.H, M.H., M.A.
NIDN: 1027038601

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIDN: 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Penerapan Hukum Terhadap Anggota POLRI Yang Menggunakan Kekerasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 15 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Yohanes Ndoa Owa

ABSTRAK

YOHANES NDOA OWA, 201720251024, Penerapan Hukum Terhadap Anggota POLRI Yang Menggunakan Kekerasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jumlah Halaman 138, Tahun 2019.

Tugas utama POLRI adalah berkaitan dengan pemeliharaan kemantapan keteraturan sosial masyarakat dan berbagai bentuk pelayanan dan perlindungan kepada warga, komuniti, dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya seringkali dihadapkan pada keharusan melakukan tindakan keras terhadap pelaku tindak pidana untuk meminimalisir bahaya atau efek yang ditimbulkan dari pelaku tindak pidana. Tindak kekerasan yang dilakukan anggota POLRI tersebut seringkali berbenturan dengan ketentuan Hak Asasi Manusia. Sejatinya, di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi pendekatan normatif dan Empiris. Penelitian Hukum normatif memiliki objek kajian tentang norma-norma atau hukum positif yang berlaku, sedangkan penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah Pengaturan dan pelaksanaan sanksi bagi Anggota POLRI yang menggunakan dari perspektif Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, diatur secara jelas pada Pasal 14 huruf E jo. Pasal 19 ayat 1 huruf b jo. Pasal 21 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 jo Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, namun dalam pelaksanaannya ternyata belum cukup efektif, khususnya dalam hal penindakan terhadap pejabat atau anggota POLRI yang diduga melakukan tindakan kekerasan.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kekerasan, dan Kepolisian

ABSTRACT

YOHANES NDOA OWA, 201720251024, *Law Enforcement of National Police Members Who Use Violence Against Criminal Actors From the Perspective of Human Rights, Number of Pages 138, Year 2019.*

The main tasks of the Indonesian National Police are related to maintaining the stability of the social order of society and various forms of service and protection to citizens, communities, and communities. In carrying out their duties, they are often faced with the necessity of committing a violent act against a criminal offender to minimize the danger or effect caused by a criminal offender. The acts of violence committed by members of the Indonesian National Police often clash with the provisions of Human Rights. Indeed, in Indonesia it has been regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Police, PERKAP Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in the implementation of the Indonesian National Police Task Force and National Police Regulation Number 14 of 2011 concerning the Indonesian National Police Professional Code of Ethics. But in its implementation there are still many problems faced. In this study the author uses the methodology of normative and empirical approaches. Normative law research has an object of study of the norms or positive laws that apply, while empirical legal research has the object of study of people's behavior. The conclusion of this study is the regulation and implementation of sanctions for POLRI Members who use from the perspective of the Chief of Police Regulation Number 14 of 2011 and Law Number 2 of 2002 concerning Police, clearly stipulated in Article 14 letter E jo. Article 19 paragraph 1 letter b jo. Article 21 of the Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2011 in conjunction with Article 34 paragraph 3 of Law Number 2 Year 2002 concerning the Police, but in its implementation it has not been effective enough, especially in terms of prosecution of police officers or members suspected of committing acts of violence.

Keywords: *Human Rights, Violence, and Police*

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera dan Puji Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan mengucapkan Puji syukur Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu, sebagai salah satu syarat kelulusan program pasca sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Tesis ini Peneliti memilih judul: “*Penerapan Hukum Terhadap Anggota POLRI Yang Menggunakan Kekerasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*” Peneliti menyadari bahwa materi Tesis ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Tesis dengan sebaik-baiknya.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. DR. Slamet selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. DR. H. Erwin Owan Hermansyah SH., MH., Selaku Pembimbing Satu Tesis.
4. DR. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM. Selaku Pembimbing Dua Tesis.
5. Dosen Fakultas Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda yang telah menginspirasi saya, dan telah membesar dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan. Ibunda, yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesar saya dengan Cinta dan Kasih sayang sepanjang jalan.
7. Saudara saya, Kakak peneliti yang telah mendukung dan memotivasi saya dalam setiap langkah kehidupan.

8. Saudara saya, Adik, yang selalu memberikan dukungan dalam menjalani program Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Kepada Istriku tercinta, yang selalu mendukung dan memberikan pengertian yang amat dalam.
10. Kepada kedua anakku tercinta, yang telah memberikan semangat dan inspirasi tersendiri bagi kehidupan peneliti.
11. Kepada seluruh Sahabat Terbaik saya yang selalu hadir disaat saya susah dan senang, yang telah membantu dan memotivasi saya ketika menghadapi kesulitan dan tantangan berat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Seluruh Rekan-rekan saya, Keluarga Besar Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2017 yang telah melalui tiga tahun penuh bahagia, suka, dan duka yang penuh makna bersama saya, yang tidak akan pernah bisa saya lupakan.

Sebagai manusia biasa, peneliti sangat menyadari dalam penelitian proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstuktif dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Bekasi, Mei 2019

Yohanes Ndoa Owa

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTARK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kerangka Pemikiran dan Kerangka Teori.....	10
1.4.1 Teori Hak Asasi Manusia (Grand Theory).....	11
1.4.2 Teori Hukum Kepolisian (<i>Middle Range Theory</i>).....	17
1.4.3 Tinjauan Umum Tentang Kode Etik POLRI (<i>Applied Theory</i>)...	20
1.5 Metode Penelitian.....	31
1.6 Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
2.1 Hak Asasi Manusia.....	35
2.2 Penegakan Hukum.....	37
2.3 Hukum Kepolisian.....	40
2.4 Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.....	43
2.5 Kode Etik Profesi POLRI.....	44

BAB III BENTUK PENGATURAN MENGENAI PENGGUNA KEKERASAN OLEH ANGGOTA POLRI DARI PERSPEKTIF HAK ASASI	52
MANUSIA.....	
3.1 Pengaturan Mengenai Penggunaan Kekerasan Oleh Anggota POLRI...	52
3.2 Pengaturan Mengenai Penggunaan Kekerasan Oleh Anggota POLRI Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....	79
BAB IV BENTUK PENGATURAN DAN PELAKSANAAN SANKSI BAGI ANGGOTA POLRI YANG MENGGUNAKAN KEKERASAN DARI PERSPEKTIF PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN.....	91
4.1 Bentuk Pengaturan Sanksi Bagi Anggota POLRI yang Menggunakan Kekerasan Dari Perspektif Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.....	91
4.2 Bentuk Pelaksanaan Sanksi Bagi Anggota POLRI yang Menggunakan Kekerasan Dari Perspektif Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.....	104
BAB V PENUTUP.....	120
5.1 Simpulan.....	120
5.2 Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	125

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah.....	5
Tabel 1.2	Data Pelanggaran Kepolisian Republik Indonesia Periode 2014-2017.....	6
Tabel 4.1	Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Kepolisian selama Periode 2011-2018.....	107
Tabel 4.2	Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Bentuk Kekerasan Oleh Kepolisian Berdasarkan tempat dilakukannya selama Periode 2011-2018.....	108
Tabel 4.3	Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Bentuk Kekerasan Oleh Kepolisian Berdasarkan Golongan Pangkat selama Periode 2011-2018.....	108
Tabel 4.4	Penindakan atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Bentuk Kekerasan Oleh Kepolisian Berdasarkan Golongan Pangkat selama Periode 2011-2018.....	114
Tabel 4.5	Penindakan atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Bentuk Kekerasan Oleh Kepolisian Berdasarkan Golongan Pangkat dan Jenis Sanksi selama Periode 2011-2018.....	117
Tabel 4.6	Percentase Perbandingan Penindakan atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Bentuk Kekerasan Dengan Jumlah Laporan yang masuk Oleh Kepolisian Berdasarkan Golongan Pangkat selama Periode 2011-2018.....	118

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran.....	10

